

# **DISKUSI PUBLIK**

## **“REFLEKSI APBD ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN”**

**BEM FEB UNMUL | SABTU, 3 APRIL 2021 | 08.00 WITA - SELESAI**  
**Purwadi (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman)**



# APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)

Slides:

## Pengertian

- APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD.
- Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

# APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)

Slides:



## **APBD** terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan
2. Anggaran Belanja
3. Pembiayaan

# APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)

Slides:



## Prinsip penyusunan APBD

1. Partisipasi masyarakat
2. Transparansi dan Akuntabilitas
3. Disiplin anggaran
4. Keadilan anggaran
5. Efisiensi dan Efektifitas anggaran
6. Taat Asas

# APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)

Slides:

## Komponen APBD

### PENDAPATAN

- - PENDAPATAN ASLI DAERAH
- - DANA PERIMBANGAN
- - LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

### BELANJA

- - APARATUR DAERAH
- - PELAYANAN PUBLIK
- - BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN
- - TIDAK TERSANGKA

### PEMBIAYAAN

- - PENERIMAAN DAERAH
- - PENGELUARAN DAERAH

# Tujuan Pembangunan Daerah

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

# Manfaat Good Governance

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang antara lain ditunjukkan hal-hal berikut ini:
  - Tidak adanya manipulasi pajak;
  - Tidak adanya pungutan liar;
  - Tidak adanya manipulasi tanah;
  - Tidak adanya manipulasi kredit ;
  - Tidak adanya penggelapan uang negara;
  - Tidak adanya pemalsuan dokumen;
  - Tidak adanya pembayaran fiktif;
  - Proses pelelangan (tender) berjalan dengan *fair*;
  - Tidak adanya penggelembungan nilai kontrak (*mark-up*);
  - Tidak adanya uang komisi;
  - Tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan;
  - Tidak adanya kelebihan pembayaran;
  - Tidak adanya ketekoran biaya.

# Prinsip-prinsip Good Governance

1. Wawasan ke Depan (*Visionary*)
2. Keterbukaan & Transparansi (*Openness & Transparency*)
3. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)
4. Tanggung Gugat (*Accountability*)
5. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
6. Demokrasi (*Democracy*)
7. Profesionalisme & Kompetensi (*Professionalism & Competency*)



## Prinsip-prinsip Good Governance...

8. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
9. Keefisienan & Keefektifan (*Efficiency & Effectiveness*)
10. Desentralisasi (*Decentralization*)
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private Sector & Civil Society Partnership*)
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*)
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*)
14. Komitmen pada Pasar yang *Fair* (*Commitment to Fair Market*)

**SAMARINDA** – DPRD **Samarinda** dan Walikota **Samarinda** telah menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (**APBD**) **Kota Samarinda** tahun anggaran **2021** senilai Rp2.575.344.511.000. Persetujuan itu disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD **Samarinda** Masa Persidangan III Tahun 2020, Senin (30/11/2020). 30 Nov 2020

**SAMARINDA** – DPRD Samarinda dan Walikota Samarinda telah menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun anggaran 2021 senilai Rp2.575.344.511.000.

Persetujuan itu disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Samarinda Masa Persidangan III Tahun 2020, Senin (30/11/2020). Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Samarianda H Sugiyono SE.

Berikut rincian APBD Kota Samarinda tahun 2021 :

#### **A. Pendapatan Daerah**

1. Pendapat Asli Daerah (PAD)  
Rp534.086.248.000

2. Pendapatan Transfer Rp1.590.415.463.000

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Rp88.842.800.000

Jumlah Pendapatan : Rp2.213.344.511.000

## **B. Belanja**

1. Belanja Operasional Rp1.992.908.511.358

2. Belanja Modal Rp532.435.999.642

3. Belanja Tidak Terduga Rp50.000.000.000

Jumlah Belanja : Rp2.57.344.511.000

## **C. Pembiayaan**

1. Penerimaan Pembiayaan

Rp362.000.000.000

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  
Sebelumnya Rp362.000.000.000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan  
Rp362.000.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp 0

**Pembiayaan Netto : Rp362.000.000.000**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah  
Tahun Berkenan Rp 0